

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Akibat dari penyelenggaraan pendidikan yang otonom tersebut, akan menimbulkan pergeseran urusan dibidang pendidikan yang selama ini berada pada pemerintah pusat beralih pada pemerintah kabupaten atau kota. Perubahan tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi pendidikan, yaitu dengan mengadakan pembaharuan struktural dan sistem pendidikan pada skala nasional. Keinginan untuk mencapai keberhasilan perbaikan dan pembaharuan pendidikan, akan menentukan keberhasilan bangsa dalam menghadapi tantangan jaman di masa depan. Pemahaman terhadap penanganan pendidikan sebagai *human investment*, perlu ditata secara serius dan benar. Karena masalah nasional yang dihadapi saat ini adalah mutu pendidikan yang rendah dan banyak hal yang bersifat negatif menimpa pendidikan di daerah.

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diharapkan dapat dijadikan sebagai pencerahan pendidikan yang bersifat membebaskan dan tidak membelenggu kemerdekaan peserta didik. Untuk mencapai cita-cita pendidikan tersebut maka otonomi

pendidikan diupayakan dapat lebih berakar di masyarakat dengan kuat, sehingga dengan otonomi pendidikan dapat dijadikan sebagai langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai kekuatan pendidikan yang stabil. Visi makro pendidikan nasional, adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Visi mikro pendidikan nasional, adalah terwujudnya individu manusia baru yang memiliki sikap wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, saling pengertian dan berwawasan global. (E. Mulyasa, 2002 : 19)

Dalam pelaksanaan otonomi pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 yang berisi kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Maka pemerintah pusat membuat kurikulum nasional, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Untuk pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) perlu di desentralisasikan di daerah dan sekolah, dalam bentuk pengembangan silabus sebagai dasar proses pembelajarannya. (Depdiknas Dirjen Dikdasmen, 2003). Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di daerah di sesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan kewenangan daerah atau sekolah perlu

pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan proses belajar mengajar.

Kebijakan otonomi pendidikan, hakekatnya adalah peningkatan otonomi sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya sekolah. (Dinas Pendidikan DIY, 2003). Dengan otonomi pendidikan di daerah atau lingkungan sekolah diharapkan ada keberanian untuk berbuat sesuatu demi kemajuan mutu sekolah, sehingga akan melahirkan pemberdayaan sekolah. Keberanian untuk berbuat bagi daerah dan sekolah, diperlukan kreativitas oleh para *stage holder* untuk mengadakan berbagai *inovasi* teknis pendidikan agar memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan inovasi pendidikan tersebut pada tanggal 2 Mei 2002, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan "*Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan.*" Dalam rangka mengantisipasi pendidikan di era globalisasi. (E. Mulyasa, 2002 : v) Tantangan pendidikan yang akan dihadapi di era globalisasi akan masuk pada persoalan besar, yaitu adanya berbagai perubahan di setiap saat dan serba tidak menentu. Akibat dari globalisasi tersebut dapat menyesatkan kehidupan manusia terutama dalam menghadapi lapangan kerja, dalam hal ini perlu diantisipasi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Karena apa yang terjadi di lingkungan kerja, sedapat mungkin akan dapat diikuti oleh dunia pendidikan. Untuk menghadapi tuntutan globalisasi tersebut perlu ada perubahan yang

bersifat teknis, terutama perubahan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang berlaku sekarang secara umum adalah kurikulum 1994. Mulai tahun ajaran 2003 kurikulum 1994 dirubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Untuk pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di seluruh Indonesia, pemerintah mengadakan pilot proyek sebanyak 50 sekolah. Sedang sekolah lainnya masih menggunakan kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibanding dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mengalami perubahan yang mendasar dan dapat dibedakan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perubahan Kurikulum (Depdiknas 2003)

No	Aspek	Kurikulum 1994	Kurikulum 2004 (KBK)
1	Landasan hukum dan dokumen	Kepmendikbud No. 61/U/1993 (Seluruh Kurikulum ditetapkan oleh pusat)	PP No. 25/2000 (Pusat yang menetapkan /mengembangkan standar kompetensi).
2	Pendekatan	Berbasis konten/materi	Berbasis kompetensi
3	Konten/Materi	Padat dan tumpang tindih	Berkelanjutan dan mengacu pada struktur keilmuan
4	Proses KBK	Target yang dicapai cenderung mengarah kepada ketuntasan target kurikulum	Target yang dicapai penguasaan kompetensi oleh siswa
5	Penilaian	Lebih mengarah kepada penilaian aspek kognitif, dengan kenaikan kelas, EBTA.	Penekananan pada seluruh ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Lebih tepat dengan menggunakan sistem maju berkelanjutan

Mulai tahun ajaran 2003/2004 di Kabupaten Gunungkidul mengadakan pilot proyek pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pelaksanaan

kurikulum berbasis kompetensi diberlakukan pada 4 sekolah yaitu : SMAN 1 Wonosari, SMAN 2 Wonosari, SMAN Karangmojo dan SMAN Nglipar. Untuk sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum 1994 sebanyak 8 SMA Negeri dan 10 SMA swasta.

Tabel 1.2
Data SMA Kabupaten Gunungkidul tahun 2003/2004
(Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul)

NO	NAMA	ALAMAT
1.	SMU 1 WONOSARI	Wonosari
2	SMU 2 WONOSARO	Wonosari
3	SMU MUH. WONOSARI	Wonosari
4	SMU DOMINIKUSN WONOSARI	Wonosari
5	SMU PEMBANGUNAN WONOSARI	Wonosari
6	SMU 1 PLAYEN	Playen
7	SMU 2 PLAYEN	Playen
8	SMU PGRI PLAYEN	Playen
9	SMU PEMBANGUNAN PLAYEN	Playen
10	SMU 1 PATUK	Playen
11	SMU 1 NGLIPAR	Nglipar
12	SMU 1 KARANGMOJO	Karangmojo
13	SMU PEMBANGUNAN KARANGMOJO	Karangmojo
14	SMU MUH. PONJONG	Ponjong
15	SMU PEMBANGUNAN PONJONG	Ponjong
16	SMU 1 SEMIN	Semin
17	SMU 1 SEMANU	Semanu
18	SMU MUH. SEMANU	Semanu
19	SMU 1 PANGGANG	Panggang
20	SMU 1 RONGKOP	Rongkop
21	SMU 1 TEPUS	Tepus
22	SMU MUH. RONGKOP	Rongkop

Untuk itu pada saat ini dipandang perlu dilakukan penelitian tentang persepsi guru terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan di 4 SMA yang

melaksanakan pilot proyek kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan SMA yang belum melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Adapun judul penelitian ini adalah "PERSEPSI GURU TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN DI SMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL." (Studi Kasus : SMA Yang Melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana persepsi guru dalam pelaksanaan otonomi pendidikan pada SMA yang melaksanakan pilot proyek kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan SMA yang belum melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ?
2. Apakah ada perbedaan persepsi guru yang signifikan antara SMA yang melaksanakan pilot proyek kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan SMA yang belum melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui persepsi guru dalam pelaksanaan otonomi pendidikan pada SMA yang melaksanakan pilot proyek kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan SMA yang belum melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi guru yang signifikan antara SMA yang melaksanakan pilot proyek kurikulum berbasis

kompetensi (KBK) dan SMA yang belum melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

C. MANFAAT PENELITIAN .

1. Memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul mengenai persepsi guru terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan dalam pembelajaran di SMA Kabupaten Gunungkidul.
2. Bagi Sekolah dalam perkembangan pembelajaran di SMA Kabupaten Gunungkidul dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMA Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk masyarakat ilmiah yaitu :
 - a. Para peneliti dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literature tentang persepsi guru terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan dalam pembelajaran di SMA Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Bagi para akademisi dapat menyajikan informasi dan hasil penyajian empiris tentang persepsi guru terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan dalam pembelajaran di SMA Kabupaten Gunungkidul.